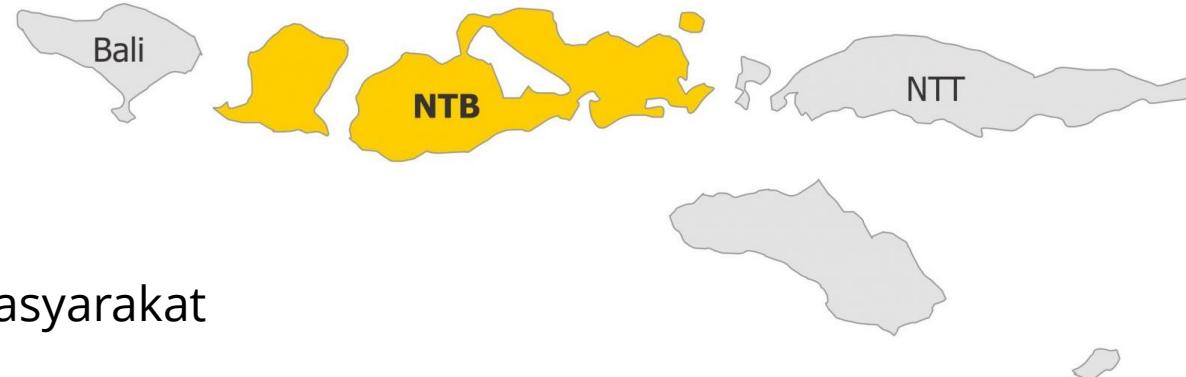


ASISTEN DEPUTI

Pemberdayaan Partisipasi
Masyarakat

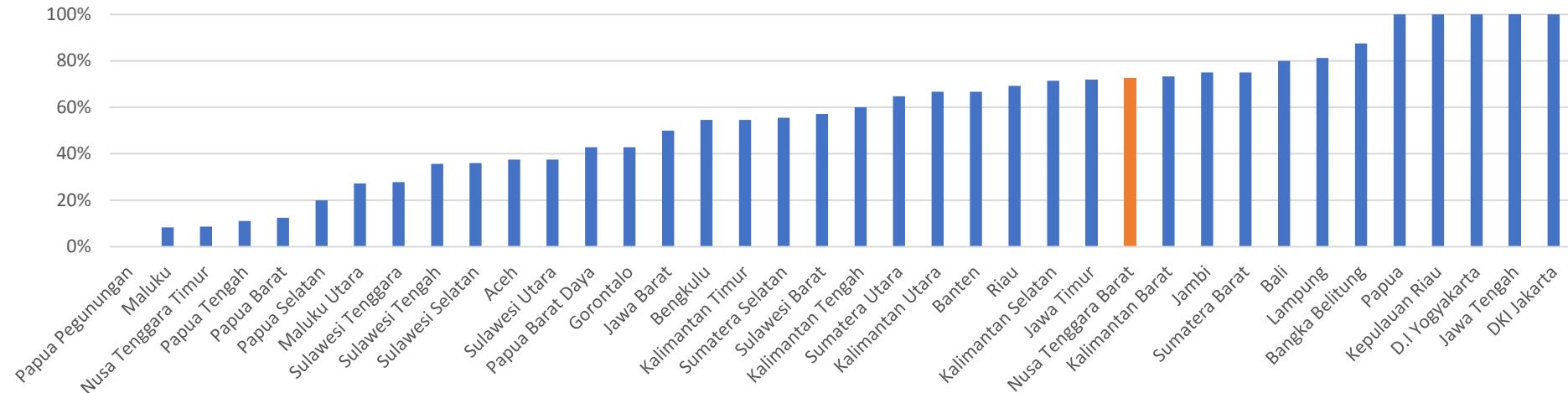
Implementasi Kebijakan FKP dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Provinsi Nusa Tenggara Barat



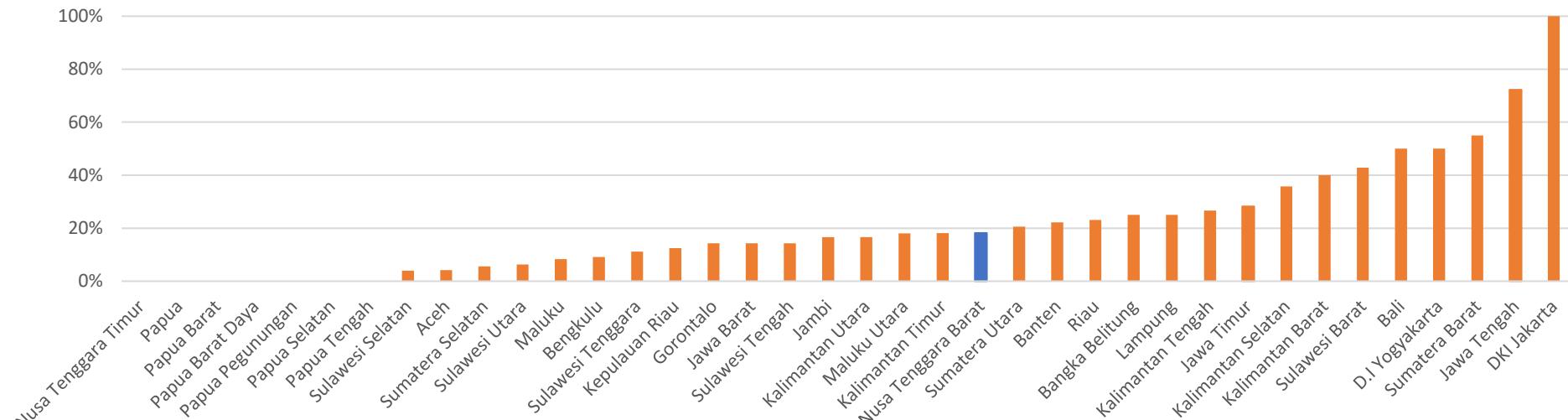
Mataram, 10 September 2024

Asisten Deputi Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat
Deputi Bidang Pelayanan Publik
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Sebaran Pelaksanaan FKP Tahun 2023



Sebaran Tindak Lanjut Hasil FKP Tahun 2022



Catatan:
Berdasarkan data pada link <https://bit.ly/pelaporanskmfkp> dan email Asdep PPM dengan batas waktu penerimaan paling lambat tanggal 30 Desember 2022

Peraturan Menteri PANRB No. 16 Tahun 2017

Tentang Pendoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan

"Forum Konsultasi Publik merupakan kegiatan dialog, diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan publik untuk membahas antara lain: rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, dampak kebijakan, evaluasi pelaksanaan kebijakan, ataupun permasalahan terkait pelayanan publik dalam kerangka transparansi dan efektivitas untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik"

Highlight Peraturan Menteri PANRB No.16 Tahun 2017 (Pasal 2)



Kewajiban melakukan FKP
sebagai bentuk peran serta
masyarakat dalam pelayanan publik



Hasil dituangkan dalam bentuk berita acara janji perbaikan pelayanan publik



Laporan hasil penyelenggaraan FKP disampaikan kepada Menteri PANRB

Urgensi Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik



Indikator Review Laporan Pelaksanaan FKP



- | | | | |
|---|--|---|--|
| 1 | Keterlaksanaan Forum Konsultasi Publik | → | Keterlaksanaan dilihat dari apakah instansi pemerintah telah menyampaikan laporan atau belum |
| 2 | Jumlah UPP yang Melaksanakan | → | Jumlah UPP dilihat dari bukti laporan organisasi serta laporan UPP yang tertera pada lampiran laporan organisasi |
| 3 | Kompilasi Laporan Oleh Biro/Bagian Organisasi | → | Laporan pelaksanaan FKP dikompilasi oleh Biro/Bagian Organisasi |
| 4 | Tindak Lanjut Tahun Sebelumnya | → | UPP telah melampirkan tindak lanjut hasil FKP tahun sebelumnya dilihat dari adanya laporan tindak lanjut pada lampiran laporan FKP |
| 5 | Kelengkapan Lampiran | → | Lampiran Laporan FKP yang telah dikompilasi terdiri dari::
1. Matriks pelaksanaan FKP tahun berjalan
2. Matriks hasil tindak lanjut FKP Tahun sebelumnya |

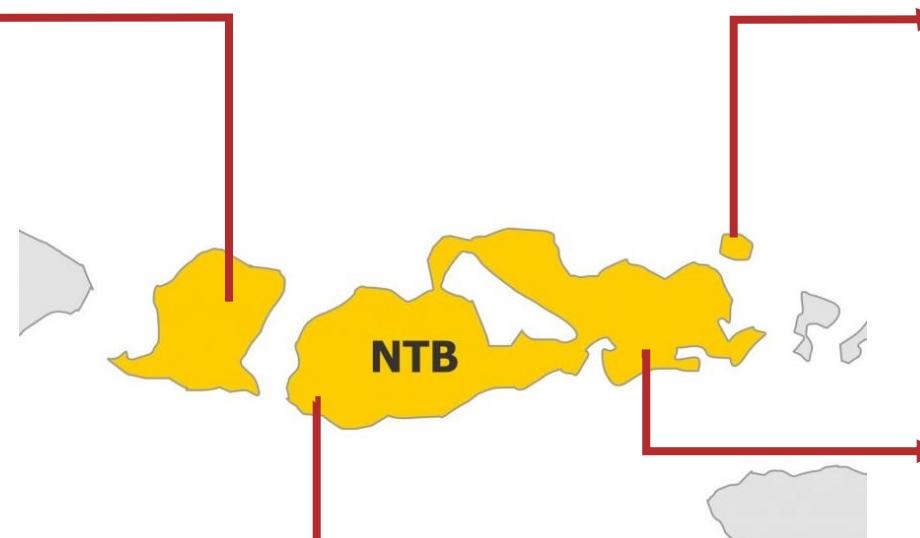
Hasil Review Forum Konsultasi Publik Lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat



Jumlah UPP yang melaksanakan FKP 1-13 UPP

5 IP dengan UPP terbanyak melakukan FKP:

1. Kab. Lombok Barat 13 UPP
2. Kab. Lombok Utara 7 UPP
3. Kota Mataram 7 UPP
4. Kab. Lombok Timur 5 UPP
5. Kota Bima 5 UPP



Mayoritas Biro/Bagian Organisasi belum mengkompilasi laporan FKP

Delapan Instansi Pemerintah di Provinsi NTB Telah Melaksanakan FKP

Mayoritas belum menindaklanjuti hasil pelaksanaan FKP

IP yang telah menindaklanjuti hasil FKP:
1. Provinsi NTB
2. Kota Mataram

ASISTEN DEPUTI

Pemberdayaan Partisipasi
Masyarakat

Catatan Utama Pelaksanaan dan Tindak Lanjut FKP

- 1 **Ruang Lingkup FKP**
Ruang lingkup pelaksanaan FKP tidak terbatas pada **pembuatan Standar Pelayanan**
- 2 **Kelengkapan Laporan FKP**
Laporan FKP harus terdiri dari **berita acara**, undangan, daftar hadir, dan dokumentasi pelaksanaan
- 3 **Keterlibatan Aktor**
Beberapa aktor yang dilibatkan dalam FKP menurut Permenpan 16 Tahun 2017 adalah Akademisi, OMS, Media Massa, Pengguna Layanan, Penyelenggara Layanan, Stakeholders Pelayanan Publik. **Penyelenggara Pelayanan perlu untuk memetakan siapa stakeholder yang berpartisipasi dalam FKP**
- 4 **Substansi Berita Acara**
Berita acara FKP harus memuat identifikasi masalah, usulan rekomendasi perbaikan, jangka waktu penyelesaian perbaikan
- 5 **Tindak Lanjut FKP**
Rencana rekomendasi perbaikan yang telah disusun, **agar ditindaklanjuti dalam waktu yang ditentukan**. Laporan tindak lanjut FKP yang dikumpulkan tahun berjalan merupakan **hasil tindak lanjut tahun sebelumnya**
- 6 **Kompilasi Laporan oleh Biro/Bagian Organisasi**
Biro/Bagian Organisasi perlu untuk melakukan kompilasi laporan UPP yang dapat digunakan basis data untuk melakukan pembinaan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan FKP

TERIMA KASIH

Contact Person:

Help Desk Asdep PPM - 08119282666

Materi:

bit.ly/partisipasiyanlik